

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, hal ini dapat dibuktikan dari persebaran keseluruhan pulau-pulau yang membentang hingga mencapai 17.504 pulau. Secara demografis maupun sosiologis masyarakat Indonesia merupakan wujud dari bangsa yang majemuk, sebab dilihat dari persebaran dan struktur masyarakatnya memiliki sistem sosial budaya yang sangat kompleks. Sifat kemajemukan ini ditandai dengan adanya perbedaan bahasa, suku bangsa (etnis), keyakinan agama serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya (Badan Pusat Statistik 2020).

Agama berperan penting dalam mengatur nilai-nilai moral, sekaligus sebagai kontrol pola sosial budaya yang paling utama dalam membangun hubungan sosial. Adapun masyarakat yang homogen dalam budaya dan agama biasanya memiliki sikap toleransi yang tinggi karna berangkat atas kepentingan dan tujuan yang sama. Oleh karenanya, diharapkan agar tercipta kerukunan tanpa harus memarginalkan salah satu agama ataupun budaya (Chaniago, 2019: 1)

Salah satu aspek yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan sosial beragama adalah adanya fragmentasi individu maupun kelompok yang menganggap bahwa segala bentuk sub budaya, kesukuan dan agama yang berasal dari ikatannya paling benar dibandingkan dengan yang lain.

Persepsi demikian akan berdampak negatif terhadap hubungan yang telah dibangun sebelumnya dan mengakibatkan mudahnya terpapar isu agama, etnis, budaya dan lain sebagainya.

Munculnya fenomena konflik di masyarakat yang menyangkut kelompok agama sudah banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah penolakan oleh warga terhadap pembangunan bangunan baru Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Konflik berawal dari upaya yang dilakukan oleh pihak gereja untuk melakukan renovasi total terhadap gereja yang sudah berdiri sejak tahun 1928 dan sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah setempat. Kisruh yang melibatkan banyak warga dan Aliansi Masyarakat Peduli Karimun tersebut diduga karena lokasi yang ditempati gereja sekarang merupakan dihuni oleh mayoritas muslim.

Selain itu, kejadian serupa juga dialami antara pihak Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin dengan forum ulama dan ormas Islam se-kota Bogor di Jawa Barat. Konflik tersebut berkaitan dengan IMB yang sudah diterbitkan oleh pemerintah setempat namun dicabut kembali karena adanya keberatan dan protes dari warga setempat terkait pendirian gereja di Taman Yasmin Bogor. Eskalasi konflik meningkat dibuktikan dengan banyaknya penolakan dari masyarakat ditambah adanya dugaan pemalsuan dukungan masyarakat terkait pembangunan

Gereja. (BBC News Indonesia, diakses Januari 2020). Beberapa kasus tersebut merupakan wujud dari beberapa kepentingan oleh kedua belah pihak yang saling bertentangan (Krisberg, 1998).

Kota Padang merupakan salah satu kota yang berada di Pulau Sumatera dan merupakan Ibukota dari Provinsi Sumatera Barat. Kota ini dikenal menganut paham pluralisme agama dan budaya, yaitu menunjukkan sikap dengan memberikan kebebasan terhadap penganut kelompok agama dan budaya lain untuk dapat hidup dan menetap di kota itu. Bila ditinjau dari hubungan sosial, mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Namun, juga terdapat beberapa kaum minoritas homogenik seperti Agama Hindu, Buddha, Khatolik, Protestan dan Khonghucu. Sejauh ini interaksi yang dibangun antarkelompok menunjukkan realitas relasi sosial yang cukup bagus. Dengan jumlah penduduk yang terbilang sedikit, kelompok minoritas menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana mereka tinggal dan hidup berdampingan satu sama lain. Akan tetapi kota ini juga akan menemui titik dimana bisa terjadi konflik yang mengarah pada perpecahan (Chaniago, 2019: 5).

Berkaca dari daerah-daerah lain di Indonesia, melihat kecenderungan munculnya fenomena konflik dan potensi konflik dari aspek agama atau kebudayaan, tidak terkecuali di Kota Padang juga memiliki kondisi sosial yang cukup sama. Semenjak tahun 2015 sampai pada tahun 2017 etnis Tionghoa Kota

Padang dihadapkan pada aksi protes yang dilakukan oleh warga Pasar Gadang dan Jamaah Tabligh Masjid Muhammadan bersama dengan organisasi kemasyarakatan untuk menolak krematorium yang dibangun di Gedung Rumah Duka Himpunan Bersatu Teguh (HBT) di Jl Pasar Borong III, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Adapun yang memicu konflik ini terjadi adalah penempatan lokasi krematorium yang dinilai tidak tepat dan mengancam keselarasan lingkungan hidup disekitarnya.

Berbicara mengenai krematorium, hal ini bukan merupakan sesuatu yang baru bahkan sudah sangat familiar bagi sebagian kalangan terutama oleh etnis Tionghoa. Krematorium merupakan tempat dilakukannya pengabuan (kremasi) terhadap orang yang telah meninggal. Pemakaman menggunakan krematorium menjadi sebuah ritual yang sakral saat sekarang ini, sebab sama-sama dimaknai sebagai kembalinya ruh diri kepada Yang Maha Kuasa.

Di Kota Padang salah satu pemakaman umum tertua adalah pemakaman milik etnis Tionghoa yang berada di dua lokasi yakni di Bukit Gado-gado dan Bungus Teluk Kabung. Bagi etnis Tionghoa Kota Padang, semenjak dikeluarkannya Perda No.11 tahun 2011 yang diberlakukan pada tahun 2012, etnis Tionghoa Kota Padang mulai mengalami kesulitan dalam mencari lahan pemakaman sebab masalah pembangunan yang terus meningkat guna memenuhi kebutuhan penduduk membuat lahan kian hari semakin berkurang. Seiring

dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi memberikan dampak terhadap penggunaan fungsi lahan sebagai tempat tinggal. Selain itu, mahal biaya retribusi lahan pemakaman yang ditetapkan oleh Pemda hingga berkisar Rp.125 ribu untuk ukuran standar 1x2 meter. Sementara etnis Tionghoa memerlukan sekitar 4x6 meter atau lebih kurang 22 meter persegi. Jika diakumulasikan keseluruhan biaya total yang dikeluarkan etnis Tionghoa termasuk upah penggalian kubur dan biaya perawatannya bisa mencapai Rp5.000.000,- sampai Rp6 000.000,- perdua tahun (Pratiwi, 2018:1).

Semenjak dikeluarkan dan diberlakukan Perda tersebut dari tahun ke tahun sampai saat ini etnis Tionghoa sudah mulai banyak beralih untuk mengkremasi jenazah kerabat mereka daripada dimakamkan. Mahalnya pungutan retribusi yang dikeluarkan setiap tahun serta sulitnya akses ke pemakaman yang biasanya dilakukan di Bungus menjadi salah satu alasan bagi etnis Tionghoa untuk membangun krematorium di HBT sebagai tempat dilakukannya proses kremasi, sebab dalam pengoperasiannya kremasi dianggap lebih efektif dan efisien. Pembangunan krematorium dilaksanakan atas inisiatif dari pihak Himpunan Bersatu Teguh sebagai upaya dalam menampung banyaknya permintaan kerabat dan keluarga agar penghormatan terakhir pada jenazah dilakukan kremasi untuk seterusnya dapat diambil abunya.

Sebagai upaya tindak lanjut atas pembangunan krematorium, pada tahun 2015 pihak HBT terlebih dahulu menemui Wali kota untuk meminta dukungan. Setelah mendapat dukungan berupa izin prinsip, HBT mengajukan izin kepada pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bappedalda) Kota Padang.

Namun hal ini menuai respon dan gejolak di tengah-tengah masyarakat, khususnya jamaah Masjid Muhammadan dan warga disekitar krematorium yang berlokasi di Pasar Gadang . Adapun yang menjadi keberatan mereka adalah pembangunan krematorium tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1987 Pasal 2 Ayat 3 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dimana salah satu poin yang disorot menjelaskan bahwa lokasi pembangunan krematorium haruslah berada di kawasan yang tidak padat penduduk dan tidak mengganggu keserasian dan keselarasan lingkungan hidup disekitarnya.

Sejak awal pendirian krematorium, warga Pasar Gadang bersama dengan jamaah tabligh Masjid Muhammadan melakukan berbagai upaya advokasi seperti membuat petisi, surat terbuka di media cetak, dan melayangkan surat pernyataan penolakan yang diajukan langsung ke Camat Padang Selatan. Pada tahun itu juga berhasil diadakan pertemuan dan langsung difasilitasi oleh Camat Padang Selatan. Bappedalda selaku pelaksana kewenangan dalam pengendalian

serta pencegahan dampak lingkungan hidup juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Sebagai tindak lanjut dari agenda yang telah dilaksanakan, negosiasi yang dilakukan belum menemui kesepakatan dan pengoperasian krematorium masih terus berlanjut.

Konflik mengenai krematorium ini bereskalasi menjadi konflik terbuka pada 23 Maret tahun 2017, setelah sebelumnya dari jamaah dan warga tempatan sekitar Masjid Muhammadan melakukan setidaknya sebanyak tiga kali aksi protes sejak awal berdirinya krematorium. Mengingat berbagai upaya dan langkah yang telah dilakukan juga belum menemukan solusi yang konkret terkait keberadaan krematorium, jamaah Masjid Muhammadan juga turut bergabung dari Aliansi Masyarakat Minang (AMM) melakukan demonstrasi berskala besar di depan Rumah Duka HBT. Aksi penolakan yang diikuti oleh ribuan massa ini turut menyita perhatian media lokal bahkan nasional.

Dalam temuan kasus seperti yang telah dipaparkan di muka, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai konflik krematorium yang berada di Rumah Duka HBT. Hipotesis yang bisa diambil dari masalah di atas adalah warga Pasar Gadang dan Jamaah Tabligh Masjid Muhammadan yang berada dekat dengan krematorium tidak menerima adanya pembakaran mayat berada dekat di lokasi tempat tinggal mereka. Keberadaan krematorium sebagai tempat pembakaran mayat tersebut juga melanggar beberapa hal prinsip yang dipercayai

oleh masyarakat sekitaran lokasi krematorium. Sementara, ormas yang merupakan kelompok kepentingan juga menolak krematorium yang berda di HBT.

Konflik mengenai krematorium ini sesuai yang dikatakan Collins, bahwasannya konflik dapat terjadi disebabkan adanya kepentingan-kepentingan antarkelompok dalam merebut sumber daya serta mengontrol pihak lain baik secara paksa ataupun tidak untuk berkuasa atas yang dikuasai. Kajian mengenai krematorium ini, belum diketahui secara jelas dan pasti bagaimana penyebab dan unsur lain yang melatarbelakangi warga Pasar Gadang dan Jamaah Tabligh Masjid Muhammadan melakukan penolakan terhadap krematorium yang didirikan oleh HBT.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik mengenai krematorium yang terjadi di Kota Padang merupakan salah satu konflik yang menyinggung masalah budaya dan keagamaan. Bagi etnis Tionghoa Padang perubahan dan tuntutan zaman mengubah cara-cara lama menjadi cara-cara baru namun tetap mempertimbangkan akar budaya lama tanpa menghilangkan sakralnya suatu kematian. Sebagaimana yang telah dibahas pada latar belakang, krematorium hadir sebagai sarana yang berfungsi untuk mawadahi dilakukannya praktik kremasi. Beberapa faktor seperti biaya pemakaman yang semakin mahal dan susahnya mencari tanah untuk dilakukan pemakaman pada

saat sekarang ini, menimbulkan inisiatif bagi pengelola krematorium untuk memindahkan proses kremasi ke gedung HBT di Jalan Pasar Borong No.III, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan.

Semenjak dipindahkannya krematorium ke gedung HBT, warga Pasar Gadang yang berada disekitaran krematorium bereaksi dengan melakukan aksi protes sebagai ekspresi penolakan terhadap krematorium.

Dari permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yakni *mengapa warga Pasar Gadang dan menolak krematorium milik Himpunan Bersatu Teguh (HBT) yang berada di Kelurahan Batang Arau? dan apa reaksi HBT terhadap penolakan warga mengenai krematorium.*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan penyebab-penyebab warga memproteskrematorium di Kelurahan Batang Arau dan upaya penyelesaian konflik tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus

Dalam mencapai tujuan umum penelitian ini, maka peneliti memiliki beberapa tujuan khusus yang menjadi fokus penelitian ini kedepannya, yakni sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan gambaran isu konflik krematorium.
2. Mendeskripsikan Aktor-aktor dan Penyebab Konflik Bereskalasi.
3. Mendeskripsikan alasan-alasan warga memprotes krematorium.
4. Mendeskripsikan penyelesaian konflik krematorium.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian mengenai penyebab protes warga terhadap krematorium sebagaimana yang telah dibahas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pengalaman serta pemahaman dalam ranah penelitian, khususnya studi mengenai konflik antaragama dalam kajian ilmu Sosiologi Konflik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa implementasi dalam pemecahan masalah-masalah sosial seperti konflik antarumat beragama atau konflik keberagaman. Adapun manfaat lainnya, memberikan masukan bagi individu, kelompok maupun instansi pemerintahan sebagai bahan evaluasi agar lebih bijaksana dalam menyikapi keberagaman dan potensi konflik yang muncul di wilayahnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Konflik

Dalam berbagai literatur, pemahaman mengenai konflik dapat bermacam-macam. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan. Konflik bersifat inheren, artinya konflik akan selalu ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Lewis Coser (dalam Poloma, 2010: 105-110), mendefinisikan konflik sebagai pertentangan kepentingan non-materialistis seperti hak-hak dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ia menitikberatkan konflik terjadi pada sebuah sistem sosial karena adanya konsekuensi-konsekuensi yang timbul secara keseluruhan. Pandangan Coser ini dapat juga dikatakan berbeda dari kebanyakan sosiolog yang memandang konflik adalah sebagai suatu tindakan yang negatif, dimana ia mengemukakan konflik juga dapat memberi pengertian positif dalam masyarakat sebab konflik dapat memunculkan pertahanan dan semangat integratif yang bisa memperkuat identitas para anggota didalam komunitas tersebut.

Selain itu, Pruitt dan Rubin (2004: 9-10) menyatakan bahwa konflik adalah sudut pandang mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara bersamaan. Secara umum kepentingan dapat diasumsikan sebagai buah dari aspirasi yang diwujudkan melalui tindakan untuk mencapai kepentingan masing-masing pihak.

Namun ia menjadi bertentangan apabila salah satu dari kedua belah pihak merasa ada keberatan terhadap apa yang ditunjukkan oleh pihak lawan.

Konsep konflik yang dibangun oleh Pruitt dan Rubin hanya sebatas pada persepsi dan tidak nyata. Dalam perspektif sosiologi, konflik ditekankan pada pertentangan kepentingan yang nyata dan dapat dicapai secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat. Ini sesuai dengan yang disampaikan Afrizal (2018: 6), bahwa konflik terjadi dalam hubungan kolektif dan sosial. Adapun keinginan dan beberapa tujuan yang hendak dicapai agar para pihak yang bertentangan dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing.

Poloma (2003) juga mengatakan bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok agar dapat memperkuat kembali identitas kelompok supaya tidak lebur dalam dunia sosial disekitarnya.

Adapun Fisher (dalam Susan, 2009) membagi 4 (empat) tipe-tipe konflik berdasarkan sikap, perilaku dan situasi konflik. Tipe-tipe tersebut terdiri dari: 1) Tanpa konflik; menggambarkan sesuatu yang relatif stabil dan kondusif, terdapat hubungan-hubungan antarkelompok bisa saling memenuhi dan damai. 2) Konflik tertutup (laten); menggambarkan situasi konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermungkaan untuk segera ditangani. 3) Konflik terbuka

(manifes); menggambarkan situasi konflik yang nyata dan telah muncul kepermungkaan, dan segera membutuhkan tindakan untuk menyulut api konflik yang sudah berakar kuat. 4) Konflik di permungkaan; memiliki akar yang dangkal dan bahkan belum diketahui penyebabnya, namun muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran.

Para pemuka dibidang sosial yang lainnya seperti Randall Collins (dalam Ritzer, 2014: 154-157) mengemukakan bahwa konflik adalah pertentangan kepentingan yang menjadi bagian proses sentral dalam kehidupan. Collins lebih menitikberatkan sudut pandanganya terhadap individu namun tetap mengkaitkannya terhadap struktur sosial. Ia menjelaskan bahwa untuk mengukur konflik haruslah secara komprehensif dan dalam tataran yang lebih luas yakni masyarakat. Jadi, definisi konflik yang tepat yang dikemukakan oleh Collins adalah pertentangan kepentingan, dimulai dari hal yang bersifat individual hingga mencapai tingkat yang lebih tinggi atau berada pada tataran struktur. Lebih lanjut, konflik juga bisa disebabkan karena adanya penggunaan kekerasan atau paksaan untuk merebut sumber daya dalam hubungan sosial.

Collins (dalam Ritzer, 2014: 157) dalam pendekatannya membagi atas tiga prinsip dasar; *Pertama*, Collins percaya bahwa penduduk tinggal pada dunia yang dapat dikonstruksi sendiri atau bersifat relatif. *Kedua*, orang lain mempunyai kekuatan untuk mengontrol pengalaman subjektif seseorang.

Ketiga, orang lain secara terus-menerus mengontrol seseorang yang melawan mereka.

Sebagai wujud proses sosial yang sifatnya dinamis, struktur sosial mempengaruhi dan membantu dalam memproduksi konflik. Adapun tujuannya adalah untuk memperkuat solidaritas atau memunculkan disintegritas.

1.5.2 Konsep Protes

Protes merupakan konsep yang diadopsi dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam hakikatnya, kata protes diadopsi dari bahasa Inggris yakni *protest* yang berarti: memprotes/menentang atau sanggahan. Dalam artian lain, makna protes sendiri merupakan bentuk kata sifat yang berarti sanggahan, pembangkangan, atau menyanggah (Echols, 2003:481).

Protes merupakan pernyataan tidak menyetujui, menentang, menyangkal dan sebagainya; sebagian orang melancarkan kecaman pedas dan keras. Memprotes berarti menyatakan tidak setuju, menyangkal, dan sebagainya; menentang. Memprotes berarti orang yang memprotes (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:406). Sedangkan menurut John Lofland (2003: 2), protes merupakan kata benda dan kata kerja yang berarti; pernyataan pendapat secara beramai-ramai dan biasanya berupa pembangkangan; keluhan, keberatan, atau ungkapan keengganan terhadap suatu gagasan atau tindakan; ekspresi penolakan secara lugas; deklarasi oleh pihak tertentu sebelum atau pada saat melaksanakan

kewajiban yang dibebankan kepadanya yang dianggap ilegal, pengingkaran terhadap tuntutan yang dibebankan, menuntut hak dan melakukan klaim untuk menunjukkan bahwa tindakannya tidak dilakukan secara sukarela; menyatakan suatu hal secara terbuka dimuka umum; melakukan deklarasi penolakan tertulis secara formal; berjanji untuk melakukan penolakan secara beramai-ramai; mendudukan masalah pada proposisinya.

Bert Klandermans (2005:2), juga mendefinisikan protes sebagai dinamika sosial yang melakukan aksi-aksi kolektif baik berupa pemogokan maupun demonstrasi/protes atau petitis yang mampu berpartisipasi di dalam gerakan sosial. Selain itu, Afrizal (2018: 3) menambahkan pengertian protes sebagai reaksi suatu pihak yang terkena perbuatan pihak lain, mengandung unsur keberatan dan penentangan/ perlawanan.

Salah satu bentuk protes yang pernah terjadi adalah perlawanan komunitas dua nagari di Sumatera Barat dan komunitas enam belas desa di Provinsi Riau yang berkaitan dengan pembangunan DAM (waduk) Koto Panjang. Protes ini ditujukan kepada pemerintah atas pelanggaran janji pergantian rugi atas tanah, rumah dan ladang-ladang milik warga. Dalam protes yang dilakukan terjadi aksi-aksi kekerasan seperti pemukulan, penahanan dan intimidasi oleh aparat keamanan. Berdasarkan hal ini dapat dimaknai protes sebagai perlawanan dan

ketidaksetujuan salah satu pihak yang ditujukan kepada pihak lain atas dasar-dasar yang telah disepakati.

1.5.3 Konsep Pertentangan Kepentingan

Pertentangan kepentingan dapat diartikan sebagai keinginan atau tujuan yang hendak dicapai (Afrizal, 2018: 6). Sementara Pruitt dan Rubin, menyatakan pertentangan kepentingan adalah inti dari pemaknaan kata konflik. Mereka menganggap konflik sebagai perbedaan kepentingan yang dipersepsikan, atau lebih sederhana konflik adalah kepentingan yang tidak bersesuaian.

Pertentangan kepentingan dapat dibagi atas dua macam yakni pertentangan kepentingan personal, dimana kepentingan aktor dianggap sebagai kepentingan yang melekat kepada pelaku sebagai individu. Dalam pengertian lain, kepentingan personal dianggap sebagai ketidaksesuaian tujuan yang sifatnya pribadi yang hendak dicapai oleh para pihak dalam suatu relasi sosial. Berbeda dari itu, kepentingan struktural memiliki pengertian lain dimana kepentingan itu sebenarnya adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh orang atau kelompok terkait dengan posisi-posisi dalam organisasi (Afrizal, 2018: 6).

1.5.4 Konsep Penyebab Konflik

Konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan antara kelompok komunitas terhadap kekuasaan dan wewenang terhadap suatu objek. Konflik dapat dikatakan sebagai proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan,

penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga batas antara dua atau lebih konflik (Poloma, 2003: 107).

Randall Collins melihat faktor penyebab terjadinya konflik berasal dari kekecewaan satu kelompok yang dapat menimbulkan konsekwensi sehingga dilakukan pemaksaan kehendak terhadap pihak yang berseberangan untuk memenuhi keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis. Dalam hal ini juga termasuk pada penggunaan ancaman kekerasan sebab mereka yang menguasai alat paksaan dapat dengan mudah menghancurkan lawannya. Namun secara emosional mereka tidak memiliki komitmen terhadap keteraturan sosial yang ada dalam artian yang sama mereka yang lebih memiliki power atau berada pada kedudukan yang paling atas (Johnson: 1990: 209-210).

Selain itu Pruitt dan Rubin menjelaskan faktor penyebab konflik disebabkan oleh tingkat aspirasi kedua belah pihak yang meyakini bahwa mereka memiliki wewenang yang cukup dan merasa punya hak atas objek yang dipertikaikan. Dalam pertimbangannya mereka melakukan tindakan tersebut atas sikap yang dianggap realistis dan idealis (Pruitt dan Rubin, 2004).

1.5.5 Konsep Krematorium dan Kremasi

Krematorium makin banyak dipilih masyarakat modern untuk mengelola jenazah karena nilai kepraktisan dan nilai ekonomi. Krematorium dianggap sebagai fasilitas yang berkonsep pragmatis yang melihat proses kremasi sebagai

kegiatan utama yang memiliki manfaat tanpa harus memperhatikan makna atau perasaan yang mengikutinya. Fasilitas krematorium terlihat mirip bangunan pabrik yang dingin, menakutkan, serupa satu sama lain dan tidak memperhatikan kenyamanan penggunaannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan krematorium sebagai tempat membakar mayat sehingga menjadi abu: a/ perabuan.

Krematorium ada untuk merayakan proses hidup manusia. Fungsi krematorium diciptakan bagi orang yang hidup dan mengenang orang yang telah meninggal. Orang hidup yang mengunjungi fasilitas krematorium diharapkan dapat memaknai proses kematian sebagai kesedihan yang digantikan harapan dan kepastian. Fungsi krematorium juga diciptakan bagi orang yang telah mati, bukan untuk menyembah yang telah meninggal tetapi untuk mengenang pengalaman bersama orang yang telah meninggal (Kurniawan, 2018: 4-5).

Sejalan dengan itu, kremasi sederhananya memiliki arti sebagai praktek penghilangan jenazah manusia setelah meninggal dengan cara membakarnya.

a) Tujuan Kremasi

Upacara kremasi ini dilaksanakan guna menghormati leluhur yang telah meninggal. Setiap pelaksanaan penghormatan terakhir yang dilakukan ini memiliki tujuan. Tujuan yang dimaksud ini berdasarkan dari masyarakat itu sendiri dan juga sudah menjadi ajaran ataupun kebiasaan. Tradisi kremasi ini

sudah sejak lama dilakukan, proses pemakaman secara kremasi ini paling banyak diminati masyarakat lantaran lebih praktis, sehingga tidak merepotkan yang ditinggalkan yang harus mengurus kuburannya bila dikubur. Namun ada juga anggapan bahwa kremasi itu bertujuan untuk membantu roh-roh yang sudah meninggal agar segera lepas dari keterkaitannya didunia (Madona, 2017)

Pembakaran jenazah (kremasi) sudah ada sejak zaman purbakala pada masa Animisme (kepercayaan pada roh-roh) dan Dinamisme (kepercayaan akan kuasa adikodrati pada benda-benda tertentu). Pada zaman ini kremasi dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi permintaan terakhir dari almarhum agar dikehidupan yang lain almarhum akan tenang dengan kematiannya.
- 2) Kremasi ini merupakan proses pengabuan, secara teknis proses pengabuan ini sangatlah praktis dan efisien. Dimana saat tahun-tahun tertentu, keluarga tidak repot untuk menziarahi kuburan, hal ini dimaksudkan agar hari-hari tertentu itu, keluarga dapat mengirimkan doa dari rumah ataupun dar Vihara.
- 3) Kepercayaan masyarakat yang kuat akan adanya hal mistis juga mempengaruhi tujuan dari pelaksanaan kremasi. Masyarakat beranggapan bahwa jika memilih kremasi, maka tubuh orang mati tidak dipakai oleh roh-roh jahat untuk mencelakakan manusia.

4) Dalam kelompok masyarakat, tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun juga merupakan tujuan dari pelaksanaan kremasi ini.

b) Proses Pelaksanaan Kremasi

Dalam ritual kremasi etnis Tionghoa melalui beberapa proses yang merupakan tradisi dan juga sudah biasa dilakukan pada saat upacara kematian. Proses diawali dari beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga yang juga dibantu oleh pihak rumah duka hingga tahap pelaksanaan ritual kremasi. Proses pelaksanaan ritual kremasi pada etnis tionghoa ini dilakukan di rumah duka. Dulu, sebelum adanya rumah duka, segala bentuk proses upacara kematian dilaksanakan di rumah keluarga, mulai dari membersihkan jenazah, merias jenazah, hingga pemakaman dilaksanakan oleh pihak keluarga langsung.

Berikut beberapa tahapan yang dilalui sebelum jenazah dikremasi:

- a. Rapat Keluarga
- b. Persiapan oleh pihak keluarga
- c. Persiapan oleh pihak Rumah Duka
- d. Sebelum masuk peti
- e. Persemayaman almarhum di Rumah Duka

f. Acara tutup peti

1.5.6 Tinjauan Sosiologis

Dalam mencapai tujuan sebuah penelitian dibutuhkan teori untuk menjelaskan bermacam fenomena secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dari Randall Collins. Menurut Collins konflik adalah pertentangan kepentingan, dimulai dari hal bersifat individual hingga mencapai tingkat yang lebih tinggi atau berada pada tataran struktur. Pertentangan kepentingan yang dikemukakan oleh Collins ini bersifat sintesis dan integratif. Pendekatan konflik oleh Collins dibagi menjadi tiga prinsip dasar, *pertama*, Collins percaya bahwa penduduk tinggal pada dunia subjektif yang dikonstruksi sendiri. Kedua, orang lain mempunyai kekuatan untuk mengontrol pengalaman subjektif seseorang. Ketiga, orang lain secara terus menerus mengontrol seseorang yang melawan mereka.

Pendapat Collins, konflik merupakan proses sentral kehidupan sosial sehingga dia tidak menganggap konflik itu baik atau buruk. Penyebab terjadinya konflik bermacam-macam, bisa disebabkan oleh perbedaan individu, latar belakang budaya, kepentingan, maupun perubahan-perubahan nilai yang cepat. Berdasarkan konflik integratif yang dikembangkan oleh Collins (1975) sangat berkaitan dengan konflik ideologi. Collins dan Coser berpendapat bahwa masyarakat beragama hidup dalam dunia subjektif yang dibangunnya sendiridan

masyarakat lain mempunyai kekuatan untuk melakukan control. Selain itu, menurutnya masyarakat mempunyai persepsi sendiri berdasarkan sistem budayanya, meskipun secara subjektif belum tentu sesuai dengan sistem ideologi yang dianutnya.

Collins mengemukakan bahwa konflik dapat terjadi apabila adanya penggunaan kekerasan dan paksaan yang ditujukan kepada salah satu pihak demi mencapai kepentingannya dalam upaya memaksimalkan keutunganterhadap pihak lain. Namun ia juga berpendapat bahwa salah satu pihak dapat menghindari pertentangan dengan tidak menggunakan kekerasan untuk memaksimalkan kepentingan yang berhadapan dengan pihak lain (Ritzer, 2004: 160-164).

Seperti yang telah dijelaskan konflik yang bersifat pluralitas, baik berkaitan dengan agama, etnis maupun yang lainbisa muncul karena adanya pertentangan yang timbul dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok karena perbedaan cara pandang, perbedaan kepentingan, ataupun perbedaan latar belakang sosial budaya. Dalam realitanya salah satu cara yang digunakan dalam memenangkan konflik adalah dengan cara penggunaan paksaan dan kekerasan.

Dalam kaitannya dengan teori ini konflik muncul karena adanya kepentingan yang bertentangan antara Jamaah Tabligh Muhammadan dan warga Pasar Gadang dengan pihak HBT dalam penggunaan rumah duka sekaligus sebagai tempat dilakukannya proses pembakaran mayat (kremasi). Selain itu,

adanya pemaksaan kehendak dari satu pihak untuk segera memberhentikan pengoperasian pembakaran mayat yang dilakukan dirumah duka HBT.

1.5.7 Penelitian Relevan

Studi mengenai konflik krematorium atau konflik antarumat beragama sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut berguna untuk menunjang penelitian sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam melaksanakan penelitian. Adapun perbandingannya dapat dilihat dari implementasi teori, objek dan analisis data yang digunakan. Diantara penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, penelitian oleh Mohammad Ali Al Humaidy (Vol. XII No.2 2007) dengan judul “Analisis Stratifikasi Sosial Sebagai Sumber Konflik Antar Etnik di Kalimantan Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyebab atau sumber terjadinya konflik antar etnik di Kalimantan Barat yang berfokus kepada tingkatan stratifikasi sosial. Beberapa faktor dan penyebab terjadinya konflik tersebut antara lain: 1) Keterbelakangan dan keterasingan masyarakat lokal disebabkan dominasi ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum yang dirasakan oleh penduduk asli Dayak terhadap warga pendatang yang dirasa telah mengabaikan hak-hak mereka sebagai penduduk asli Dayak. 2) Benturan budaya serta persaingan untuk menguasai sangat besar sehingga rentan untuk memunculkan konflik etnik. 3) Faktor karakter/watak orang Dayak dan Madurayang tertanam

pada masing-masing kelompok sehingga menyimpan stereotype yang buruk dan berdampak pada kekacauan dan konflik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin Iskandar (Volume 19 No.1 Juni 2009) dengan penelitian “Resolusi Konflik Etnik Samawa dan Etnik Bali di Sumbawa”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang yang menyebabkan konflik antarkedua etnik yang masih menyamar selama lebih dari dua puluh lima tahun. Hasil dari penelitian ini disebabkan atas beberapa faktor antara lain: (1) Faktor sosial ekonomi, konflik antar kedua etnik ini disebabkan antara lain karena perebutan sumber-sumber ekonomi termasuk lahan-lahan, permukiman/pertanian, tempat berjualan/kios-kios di pasar yang banyak dikuasai oleh etnik Bali sehingga memunculkan kecemburuan dan kompetisi yang kurang adil atas dominasi etnik Bali. (2) Faktor sosial dan politik, hal ini disebabkan karena keberhasilan etnik Bali dalam mendominasi dan menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, swasta dan BUMN. (3) Faktor sosial budaya, penyebab konflik dalam aspek sosial dan budaya disinyalir karena adanya benturan yang keras antarkedua etnik, misalnya masyarakat Bali yang cenderung terbuka akan adat istiadat seperti melakukan upacara-upacara keagamaan (ngaben dan arak-arakan lainnya), judi, minum-minuman keras dan kawin lari antarkedua etnik, dimana oleh etnik Samawa ini merupakan perbuatan yang

sudah melampaui batas menurut tradisi, adat, dan agama islam yang mayoritas dianut oleh etnik Samawa.

Ketiga, adalah karya penelitian dari Rilma Devi Lestari (2018) dengan judul “Regulasi Konflik Masyarakat Multietnik Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan regulasi konflik masyarakat multietnik di Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etnis Minangkabau dan etnis Nias telah mampu melakukan regulasi konflik di Nagari Sungai Buluh Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan diakomodirnya kepentingan etnis Nias dalam beberapa kesepakatan seperti pemberian gelar adat Minangkabau pada etnis Nias sebagai bentuk penerimaan etnis Nias di Sungai Buluh.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas, perbedaan penelitian tersebut dengan yang peneliti kaji adalah selain dari segi waktu dan lokasi penelitian, fokus penelitiannya juga tentu berbeda. Peneliti berusaha menjelaskan bagaimana respon serta penyebab konflik yang melibatkan HBT terhadap aksi protes warga berkenaan dengan krematorium yang berada di Kota Padang.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih agar penelitian yang dilakukan terqualifikasi dengan

mengumpulkan dan menganalisis data baik menggunakan kata-kata (lisan) maupun dengan perbuatan-perbuatan manusia dan digambarkan secara sistematis, faktual dan akurat dari peristiwa dan sifat-sifat tertentu (Afrizal, 2014:13). Sebaliknya, bukan berarti penulis tabu dengan angka-angka tetapi penggunaan angka dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sekunder bukan menjadi fokus utama, sebab data yang bersifat angka (kuantitatif) hanya digunakan sebagai pendukung argumen, interpretasi atau laporan penelitian.

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam mengamati dan mengkaji sebuah realitas sosial pada sebuah penelitian maka digunakanlah pendekatan yang dapat menjawab hal tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan yang paling tepat digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipercaya dapat memahami sebuah realitas sosial dimana terdapat perilaku, motivasi, tindakan ataupun persepsi dan lain-lain yang terjadi di masyarakat dan dibutuhkan pengamatan langsung untuk memperoleh data secara deskriptif dan holistik (menyeluruh).

Hal di atas relevan terhadap apa yang dikemukakan oleh Afrizal (2014:13), bahwa dalam pendekatan kualitatif peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data yakni berupa kata-kata (baik lisan maupun tulisan) serta dari perbuatan manusia itu langsung. Dalam artian lain hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan dalam pendekatan kuantitatif yakni

menggunakan angka-angka dalam mengumpulkan hingga mengolah hasil penelitiannya.

Selanjutnya, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara sistematis baik itu berupa pengalaman, fakta-fakta yang terjadi di lapangan guna menjawab mengapa masyarakat melakukan protes terhadap lokasi krematorium dan apa reaksi yang ditimbulkan oleh Himpunan Bersatu Teguh diakibatkan adanya protes tersebut.

Sementara, dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif, yakni penelitian yang mendeskripsikan bagaimana suatu fenomena yang terjadi dapat memberi gambaran secara mendalam, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta berhubungan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan secara rinci bagaimana penyebab konflik krematorium yang terjadi di Kecamatan Padang Selatan.

1.6.2 Informan penelitian

Afrizal (2014: 139) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif, mengartikan informan penelitian sebagai subjek penelitian dimana dia memberikan keterangan/informasi baik itu mengenai dirinya sendiri, orang lain ataupun suatu kejadian terhadap peneliti atau pewawancara mendalam. Sedangkan menurut Spradley (1997: 25-37), informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang baik tentang dirinya atau orang lain ataupun

kejadian kepada peneliti. Afrizal (2014: 139), mengkategorikan informan penelitian ada dua, yakni:

1. Informan Pelaku, yaitu informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maksudnya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Informan pelaku dalam penelitian ini adalah pengelola Rumah Duka Himpunan Bersatu Teguh (HBT), serta masyarakat yang terlibat aktif dalam aksi protes, serta aktor-aktor dalam aksi protes mengenai lokasi krematorium tersebut.
2. Informan Pengamat, yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai literatur mereka disebut juga sebagai informan kunci. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah Camat Padang Selatan.

Dalam sebuah penelitian, sebelum mewawancarai informan sebaiknya peneliti menentukan terlebih dahulu informan mana yang dituju, apakah informan pengamat atau informan pelaku. Oleh sebab itu, ketika mencari

informan penelitian, peneliti harus benar-benar menyadari bahwa satu informan bisa saja memainkan dua peranan sekaligus.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan informan secara disengaja (*purposive sampling*), artinya informan yang dipilih sudah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang mana dalam penetapan kriteria informan mesti sudah memenuhi syarat sehingga layak untuk dimintai keterangan atau informasi (Afrizal, 2014: 140). Kriteria informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam konflik, dan mengerti serta mengetahui masalah penelitian. Adapun orang yang sudah memenuhi kriteria sebagai informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat dan pimpinan adat setempat.
2. Pengelola Himpunan Bersatu Teguh.
3. Organisasi/ pimpinan aksi protes.
4. Pejabat pemerintah terkait.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, pemilihan informan merujuk pada kriteria yang telah ditetapkan dan akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya mengenai permasalahan yang akan diteliti. Berikut data informan disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
----	------	------------

1.	Chandra Pranata Long	Sekretaris HBT
2.	Irfianda Abiddin	Ketua FMM
3.	Anton	Warga Pasar Gadang
4.	Walhamzah	Warga Pasar Gadang
5.	Ridwan	Warga Pasar Gadang
6.	Fuji Astomi	Mantan Camat Padang Selatan
7.	Hanura Rusli	Kabid Sosial HBT

Sumber: *Data Primer, 2020.*

1.6.3 Data yang Diambil

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dibagi atas dua sumber utama yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer (*primary data*)

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti saat di lapangan, baik yang bersumber dari wawancara mendalam, catatan resmi dan dokumen yang valid untuk mendukung tujuan dan kebutuhan penelitian. Data yang akan diperoleh berupa informasi-informasi dari informan mengenai krematorium, kronologis protes yang dilakukan oleh warga, dan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kedua belah pihak beserta pihak-pihak yang terlibat dalam konflik krematorium ini.

2. Data Sekunder (*secondary data*)

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, serta data-data statistik yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis juga menghimpun data/informasi yang diperoleh dari media cetak dan online sebagai guna melengkapi data-data yang belum tercapai pada saat wawancara mendalam.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen .

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam adalah sebuah interaksi sosial informal antara seorang peneliti dengan para informannya, jelasnya seperti *maota-ota* dalam keseharian masyarakat Minangkabau. Proses pengumpulan informasi dengan wawancara mendalam ini penulis lakukan guna memperoleh informasi yang valid serta mempermudah dalam menganalisis data (Afrizal, 2014: 137). Untuk mendapati informasi tersebut peneliti telah melakukan wawancara dengan aktor-aktor konflik seperti dari pihak pemerintahan, HBT, maupun masyarakat yang terlibat secara aktif dalam konflik krematorium ini. Wawancara mendalam dilakukan dari Bulan November 2019 sampai Bulan Maret 2020. Terdapat beberapa kendala saat pengumpulan informasi dengan wawancara mendalam ini,

seperti sulit untuk mencari informan yang sesuai dengan kriteria penelitian yang sudah ditetapkan sertakurangnya daya ingat informan saat menuturkan informasi mengenai kejadian yang sudah terjadi sekitar empat tahun yang lalu sejak dikumpulkannya informasi ini.

Burhan Bungin juga menuturkan bahwa wawancara mendalam bersifat terbuka, pelaksanaan wawancara tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi. Peneliti tidak boleh cepat puas dengan informasi yang diberikan informan, sehingga peneliti perlu mengecek dan mengklarifikasi atas informasi yang diberikan oleh informan (Bungin, 2001: 100).

Sebelum mengumpulkan data dengan cara wawancara mendalam, terlebih dahulu peneliti menyiapkan serta menyusun daftar informasi terkait permasalahan yang ingin diteliti dengan tujuan agar membimbing peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian. Beberapa alat pengumpulan data atau instrumen penelitian seperti pena, buku, perekam atau kamera dibutuhkan untuk menunjang proses wawancara agar peneliti bisa mencatat atau merekam hal-hal penting yang disampaikan oleh informan.

2. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan data dalam bentuk dokumen diperlukan untuk menunjang mendapatkan data sekunder dalam sebuah penelitian. Seperti yang dijelaskan

Afrizal (2014: 21), bahwa pengumpulan dokumen dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan teknik lainnya. Waktu dan angka-angka lebih akurat dalam dokumen seperti perjanjian, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum, realisasi atau respon lembaga pemerintah terhadap sesuatu.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah kelompok, yakni warga Pasar Gadang atau kelompok masyarakat yang menolak krematorium dan juga HBT sebagai pengelola krematorium. Dalam pengertian yang lain, unit analisis dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti apakah kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis berguna sebagai pembeda antara objek penelitian dengan subjek penelitian dan sumber data. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Objek yang menjadi unit analisis sesuai dengan kriteria yang telah dipenuhi untuk penelitian ini adalah kelompok.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data kualitatif Bogdan dan Biklen, 1982 dalam (Moleong, 2014: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Di pihak lain, analisis data kualitatif Seiddel, 1998 dalam (Moleong, 2014: 248) prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian dengan menekankan pada intrepetatif kualitatif.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian, dia merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu kepada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014: 128). Pemilihan lokasi dalam penelitian ini adalah Kelurahan Batang Arau

dan Kelurahan Pasar Gadang di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Adapun alasan peneliti memilih lokasi seperti yang telah disinggung di muka adalah karena konflik yang terjadi memang berada di daerah/kawasan tersebut.

1.6.8 Proses Penelitian

Proses awal penelitian ini dilakukan pada awal Bulan Januari 2019 lalu, sebelumnya penulis melakukan kegiatan pengumpulan informasi mengenai topik penelitian yang berfokus pada kajian konflik. Melalui diskusi dengan teman, *searching* internet dan sumber-sumber lainnya akhirnya penulis menemukan suatu masalah tentang penolakan krematorium yang ada di Kota Padang. Setelah berdiskusi dengan Pembimbing Akademik untuk dimintai saran dan kritikan akhirnya penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian mengenai Penyebab Konflik Berkenaan dengan Krematorium di Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Sebelum melakukan penelitian penulis terlebih dahulu melakukan registrasi pengajuan surat untuk mempersiapkan turun ke lapangan dari Fakultas ISIP yang akan diteruskan kepada Kesbangpol Kota Padang di Aie Pacah. Setelah mendapatkan rekomendasi surat dari Kesbangpol disitulah penulis bisa melakukan penelitian langsung di lapangan baik itu melalui wawancara maupun pengumpulan dokumen.

Pada wawancara pertama penulis mengunjungi informan penelitian yaitu Bapak Irfianda Abiddin selaku ketua Forum Masyarakat Minangkabau juga

sebagai ketua aksi demonstrasi untuk menolak krematorium di Padang Selatan. Sebelumnya penulis mendapatkan nomor informan dari salah satu teman beliau di Pasar Gadang saat melakukan shalat berjamaah. Kemudian penulis membuat janji dengan beliau dan bertemu di Hotel Syari'ah Nabawi di Ulak Karang Padang. Selang beberapa bulan berikutnya penulis mulai mencari informan kedua, yakni Bapak Anton selaku koordinator lapangan pada aksi protes dan terlibat aktif dalam melakukan protes terhadap krematorium, penulis bertemu dan melakukan wawancara langsung di Masjid Muhammadan di Pasar Gadang. Karna ada beberapa kendala penulis sempat memberhentikan untuk turun ke lapangan dan mulai melanjutkan lagi pada Tahun 2020. Pada tahun tersebut penulis berhasil menemui Bapak Chandra selaku humas dan juru bicara HBT, saat itu penulis menemui beliau masih dalam suasana Covid-19 dan agak susah mendapati tanggal yang tepat sebab beliau sibuk bekerja di Pasar Raya Padang. Setelah itu penulis menemui Ibu Herni dan Bapak Ridwan selaku informan inti sebab beliau merupakan orang yang terlibat aktif dalam aksi protes yang telah dilakukan.

Dalam memilih beberapa informan yang dibutuhkan peneliti mengalami kesulitan dalam menyisir informan yang layak untuk dijadikan informan kunci, sebab dari beberapa orang yang peneliti temui kebanyakan mereka tidak terlibat aktif dalam masalah penolakan krematorium. Selain itu, beberapa informan yang

pernah penulis wawancarai banyak yang tidak mengingat kejadian pada saat aksi protes dan sebelum munculnya permasalahan mengenai penolakan krematorium tersebut. Hambatan ini cukup membuat penulis kesulitan dalam mengumpulkan data berhenti untuk melakukan penelitian cukup lama.

Tahap terakhir adalah tahap pasca lapangan, dimana peneliti mengklasifikasikan dan mengolah seluruh data yang telah diperoleh di lapangan untuk selanjutnya diolah dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah proses pengelompokan, penulis membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kemudian hasil yang disajikan dapat diperoleh dalam bentuk karya ilmiah.

1.6. Defenisi Operasional Konsep

1. Konflik

Sesuatu yang dipersepsikan berbeda dan tidak berkesesuaian terhadap apa yang dibicarakan atau dipermasalahkan oleh dua/banyak pihak.

2. Protes

Reaksi satu pihak yang terkena perbuatan pihak lain, mengandung unsur keberatan dan penentangan/perlawanan.

3. Penyebab

Segala sesuatu yang menyebabkan/ menimbulkan suatu kejadian.

5. Krematorium

Tempat yang dijadikan sebagai upacara pengabuan jenazah.

1.6.10 Pelaksanaan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) hingga turun lapangan setelah diadakannya seminar proposal pada Bulan Juli 2019. Oleh karena itu, peneliti membuat jadwal penelitian agar proses penelitian dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tabel 1.2
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun											
		2019			2020			2022					
		Jul			Feb	Mar		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1.	Seminar Proposal												
2.	Perbaikan Proposal												
3.	Penelitian Lapangan												
4.	Analisis Data												
5.	Penulisa dan Bimbingan Skripsi												
6.	Sidang Skripsi												

Sumber: Analisis Peneliti 2022